

Batas kewenangan rapat umum pemegang saham berdasarkan UU NO.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Dorothe Nawang Wulan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=128804&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRACT

Tesis ini membahas tentang batasan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (?RUPS?) sehubungan dengan situasi dimana suatu RUPS tidak terselenggara sebagaimana disyaratkan ketentuan UUPT No. 40/2007, hal mana mempengaruhi keabsahan keputusan RUPS tersebut. Kewenangan RUPS untuk memulihkan perbuatan hukum yang dikategorikan ultra vires dengan cara meratifikasi atau membatalkan perbuatan hukum tersebut belum diatur secara jelas dalam UUPT No. 40/2007, kecuali ketentuan sehubungan dengan RUPS yang pertama kali diadakan oleh Perseroan sejak Perseroan disahkan menjadi badan hukum. Tidak adanya aturan yang jelas dalam pemulihan perbuatan ultra vires oleh RUPS dapat mempengaruhi kepastian hukum atas keabsahan keputusan RUPS dan ini akhirnya dapat berdampak terhadap kepentingan Perseroan dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan.

<hr>

<i>ABSTRACT</i>

This thesis discusses the limits of the authority of the General Meeting of Shareholders (?GMS?) in connection with the convening of a GMS which was not carried out in accordance with the provisions of Company Law No. 40/2007, which matter affects the validity of the GMS? decision. The GMS?s authority to remedy a legal act which is categorized as ultra vires by way of ratification or cancellation of the legal act has not been fully regulated yet in the Company Law No. 40/2007 except for some provisions in relation to the first GMS held by the Company after the Company has obtained the status of a separate legal entity. The absence of clear provisions on the remedy of ultra vires acts by the GMS may affect the validity of the GMS? decision, this could ultimately also affect the Company?s interests and third parties who have a legal relationship with the Company.</i>